

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penelitian diatas dengan menggunakan metode wawancara, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi GCG dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah kabupaten Cirebon II Ciledug melalui teori/konsep *stakeholder*. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak kantor PPPD wilayah Cirebon II Ciledug dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, yakni melalui 3 tahap.

Pertama, tahap persiapan dilakukan melalui persiapan seluruh perangkat pelaksanaan program berdasarkan penguraian tugas pokok dalam pergub nomer 53 tahun 2001 untuk dijadikan SOP disertai bentuk komunikasi yang baik dalam internal kantor.

Kedua, tahap implementasi prinsip-prinsip GCG seperti:
a. Transparansi, melalui pembuatan laporan bulanan perolehan himpunan pajak kendaraan bermotor dari Surat Tanda Setor harian BJB, dilaporkan kepada kantor Bapenda Jawa Barat. Selain itu, memberikan informasi gambaran umum tentang pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan regulasi penghimpunan pajak kendaraan pada *website* Bapenda Jawa Barat; b. Akuntabilitas, melakukan pekerjaan sesuai yang tertuang dalam peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas lingkungan badan pendapatan daerah. Peningkatan kompetensi juga dilakukan kepada pegawai-pegawai kantor untuk meningkatkan kemampuan kinerja. Bentuk penilaian kinerja pegawai dilakukan melalui aplikasi dan pengawasan secara langsung; c. Responsibilitas, pelaksanaan penghimpunan, Kantor PPPD wilayah Cirebon II Ciledug berpegang teguh dan patuh terhadap ketentuan peraturan SOP demi tercipta stabilitas pelaksanaan dan sesuai dengan kondisi masyarakat dalam memfasilitasi setiap pelayanan penghimpunan pajak; d. Independensi, penghimpunan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada intinya yaitu oleh PPPD yang merupakan unit cabang Bapenda Jawa Barat, kemudian dibantu oleh 3 instansi seperti Polda Jabar, Bank BJB, dan Asuransi Jasa Raharja; e. Kewajaran dan Kesetaraan, ketersediaan kotak keluhan, kritik dan saran secara terbuka menjadi aspek kesetaraan pada prinsip GCG ini. Kesetaraan dalam hal penerimaan pegawai dan karyawan pada kantor tersebut tidak

dilakukan secara terbuka. Melainkan proses rekrutmen pegawai dilakukan oleh BKD provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk karyawan pembantu dilakukan rekrutmen secara bebas dan pengangkatan sesuai kebutuhan.

Ketiga, tahap evaluasi dilakukan dengan pendampingan terhadap seluruh pegawai melalui pengawasan oleh kepala pusat kepada setiap kepala seksi atau sub bagian untuk melaporkan perkembangan kegiatan. Kemudian tindak lanjut ini dengan mengadakan rapat mingguan guna membahas permasalahan dan kendala.

2. Optimalisasi penghimpunan pajak kendaraan bermotor tinjauan ekonomi Islam

Pada kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Cirebon II Ciledug optimalisasi dilakukan untuk meningkatkan penghimpunan pajak yang dilakukan melalui penerapan GCG yang dikaitkan dengan teori prinsip ekonomi Islam dalam keuangan publik Islam, seperti prinsip *Shidiq*, *Amanah*, *Tabligh*, dan *Fathanah*. Optimalisasi dilakukan, dengan program KTMDU dan layanan Samsat J'Bret. Kesungguhan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab, menjadi poin *Amanah* pada program KTMDU. *Tabligh* dalam kedua program tersebut diartikan sebagai transparansi data secara lebih akurat kepada Bapenda pusat. Sedangkan *Fathanah* berkaitan dengan kemampuan dan kompetensi para pegawai untuk dapat melaksanakan peningkatan penghimpunan pajak secara lebih modern dan maju. Beberapa prinsip tersebut sudah diterapkan dalam kedua program optimalisasi tersebut. Namun perlu pemantapan dalam menjalankan kedua optimalisasi program tersebut sehingga seluruh prinsip kenabian dalam hal ini bisa terkandung dalam pelaksanaan setiap program nya. Namun dalam penerapan *Shidiq* yang merupakan prinsip dasar diterapkan dalam seluruh program penghimpunan, akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan melalui pengawasan dan pendampingan secara lebih serius dan efisien.

B. Saran

Beberapa hal dalam penelitian ini dapat disempurnakan lagi oleh peneliti berikutnya, demi terciptanya hasil data yang lebih optimal, melalui saran berikut ini :

1. Pihak PPPD wilayah Cirebon II Ciledug

PPPD wilayah Cirebon II Ciledug diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik, terutama dalam hal pengawasan dan pendampingan yang dilakukan. Pendampingan dan pengawasan yang hanya mengandalkan

kepada aplikasi kinerja pegawai dapat menyebabkan banyak celah penyelewengan dan kelalaian kinerja yang tidak sesuai, pengawasan yang dilakukan hanya sesekali oleh kepala kantor pusat akan memunculkan kesempatan penurunan responsibilitas kinerja kantor. Aplikasi kinerja tersebut bisa saja terjadi sistem *error*. Oleh karena itu, diharapkan kantor ini lebih mengoptimalkan penerapan prinsip Shidiq dalam kinerja setiap pegawai. Dengan perilaku kejujuran loyalitas kerja yang tinggi didukung pengawasan dan pendampingan melalui aplikasi serta cara manual, dan dilakukan setiap hari, maka dapat menciptakan kondisi hubungan kerja yang lebih akuntabel.

2. Pihak akademis Ekonomi Islam

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki beberapa kekurangan dan adanya kesalahan. Penelitian ini belum sepenuhnya bersifat relevan dan komprehensif. Penulis menyarankan kepada yang berminat untuk melakukan penelitian berikutnya mengenai implementasi pelaksanaan kinerja pada suatu instansi pemerintah dengan tinjauan ekonomi Islam dapat menggunakan teori dan konsep tentang *Good Public Governance* yang dikaitkan kepada konsepsi nilai-nilai syariah ekonomi Islam secara lebih detail, dengan menggunakan indikator yang terfokus dan metode analisis data yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan pelaksanaan kinerja di instansi tersebut.